

Penelitian Asli

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

Zaki Bahrn Ni'am¹; Chavid Moyo Jaladri¹, Vida Maria Ulfa¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima: 7 Jan 2025
Direvisi: 9 Jan 2025
Diterima: 9 Jan 2025
Diterbitkan: 12 Jan 2025

Kata kunci: *Financial performance; APBD; Revenue analysis; Expenditure analysis*

Penulis Korespondensi:

Zaki Bahrn Ni'am

Email: zakibahrniam@gmail.com

Abstrak

The economic potential of East Java Province is supported by many sectors that are sources of regional income. The problem that forms the basis of this research is that the recapitulation data related to the largest corruption crime in the 2022 period ranks second after the central government. The research-related objective is to analyze the financial performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget in East Java Province in 2021-2022.

Descriptive quantitative is the type of research used with the 2021-2022 APBD financial report being the source of assessment data. The research sample is the entire population covering 38 regencies/ cities in East Java Province. Research data analysis techniques include; Expenditure variance analysis, expenditure growth analysis, independence ratio, dependency ratio, degree of decentralization, expenditure variance analysis, and expenditure efficiency ratio.

The results of the study explained that East Java Province in 2021-2022 based on revenue variance analysis is in the favorable variance category with a percentage of 106.91%, revenue growth analysis is classified as downward growth with a percentage value of -3.21%. The independence ratio shows a participatory relationship pattern with a percentage of 51.24%, the dependency ratio is medium with a percentage of 61.51%.

Jurnal Mutiara Akuntansi

e-ISSN: 2579-7611

Vol. 9 No. 2 Desember 2024 (Hal. 73-80)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i2.5632>

How To Cite: Ni'am, Zaki Bahrn, Chavid Moyo Jaladri, and Vida Maria Ulfa. "Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 9, no. 2 (2024): 73–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jma.v9i2.5632>.



Copyright © 2024 by the Authors, Published by Program Studi: Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan Negara Indonesia dapat diwujudkan melalui APBN dan APBD. Pada pengelolaan keuangan Indonesia yang baik akan berdampak positif terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai tujuan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. (Tanpa Penulis, n.d.). Memasuki Periode 2020, dampak keberlanjutan dari adanya Covid-19 masih dapat dirasakan oleh semua kalangan di segala aspek, salah satunya adalah aspek dari perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan membaik karena penurunan kasus pandemi dan pemulihan ekonomi global. Kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan CPO juga menjadi faktor positif. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi hanya diperkirakan mencapai 4,7-5,2% karena beberapa sektor belum pulih. (Selocahyo, Basoeki 2022). Hal ini, terbukti dengan hasil dari BPS terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021-2022 yang memaparkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021-2022 mengalami peningkatan nilai yang positif. Namun walaupun pertumbuhan Indonesia mengalami peningkatan yang positif, pemerintah memiliki tanggungjawab besar untuk menghadapi kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia secara merata. (Andila, n.d.)

Oleh Karena itu, pada lembaga pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dengan suatu pengukuran kinerja keuangan atas APBD melalui laporan keuangan guna meminimalisir penyelewengan terkait APBD, serta melakukan monitoring sekaligus evaluasi atas hasil dari implementasi pelaksanaan otonomi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut teori (Halim, Abdul, & Muhammad 2007) dan (Hanafi, Imam 2009) bahwa pengukuran kinerja keuangan dapat melalui analisis pendapatan dan analisis belanja. Menurut penelitian (Ningtias, Nugroho, and Ainiyah 2016) pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 menjelaskan bahwa hasil berdasarkan tingkat kemandirian konsultatif. Kemudian, menggunakan pengukuran *growth* termasuk tinggi dan menurut derajat desentralisasi fiskal ialah masih kurang. Dalam penyusunan laporan keuangan di beberapa lembaga pemerintahan di Jawa Timur seperti di Malang Raya, Kediri, Tulungagung, Blitar dan Probolinggo sudah menerapkan laporan keuangan yang telah di audit oleh lembaga audit independen. Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya ada laporan yang dianggap siluman seperti yang terjadi di Probolinggo 2015 silam. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Timur mencatatkan pencapaian ekonomi yang signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp 2.835,8 triliun. Pertumbuhannya sebesar 5,57% melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31%. Kontribusi Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga cukup besar, yaitu sebesar 14,3%. (BI Bank Sentral RI 2022).

Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, penulis memilih tema tugas akhir adalah analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi Jawa Timur dikarenakan untuk mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu melalui penggunaan variabel, jumlah sampel daerah, dan tahun yang berbeda. Dan hal ini didasarkan dalam penelitian (Yuliani 2014) yang menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik yang masih beragam serta semakin pentingnya penilaian kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat dan masyarakat sehingga butuh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam mengontrol kinerja pemerintah daerah.

Terkait fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, derajat desentralisasi, analisis varians belanja, dan rasio efisiensi belanja yang berfokus pada Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021-2022. Dalam penelitian (Ramadhan and Hendratno 2023) menyatakan bahwa dampak praktik anggaran yang didasarkan atas kinerja pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam menyikapi kinerja laporan keuangan daerah pemerintah. Dan dalam penelitian lain juga disebutkan oleh (Krisniawati 2021) Dimana Analisis Kinerja keuangan daerah adalah komponen yang dijadikan ukuran untuk digunakan dalam melihat kemampuan keuangan daerah meningkatkan pendapatan otonomi daerah, yang didasarkan atas tingkat kemandirian, efisiensi serta efektivitas pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian lain juga di sebutkan oleh (Rahmasari 2021) Dimana kinerja pemerintah daerah atas laporan keuangan memiliki perspektif berbeda terhadap analisis kinerja laporan keuangan daerah dengan memanfaatkan Analisis Rasio Keuangan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi terhadap Realisasi Anggaran daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Beberda dari hasil penelitian tersebut di temukan oleh (Maryanti and Munandar 2021) Dimana dalam penelitiannya terdapat gab yang berbeda yaitu hasil dari penelitian tingkat ekonomis yang didapatkan hanya mencapai tingkat efisiensi kinerja laporan antara 80% sampai 90% dengan namun masih belum mencapai efisiensi makasimal. Dan dalam analisis yang berbeda pada tahun yang berbeda. Dari segi hasil efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja laporan keuangan pemerintah daerah kurang efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak efisien pada tahun sebelum dilakukan pembenahan. Dan sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Deborah and Mangantar 2020) dimana Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efisien, ekonomis, serta efektif, dan juga transparan serta akuntabel. Dalam melakukan analisis pemerintah daerah harus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah. Analisis yang di terapkan adalah analisis kinerja yang memperbandingkan anatra laporan keuangan satu daerah dengan daerah yang lain, hal ini di gunakan untuk menilai keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatnya kinerja laporan keuangan dan juga pengelolaan keuangan daerah.

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Analisis laporan keuangan memungkinkan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menghitung rasio keuangan seperti kemandirian, efektivitas, efisiensi, coverage debt service ratio, keserasian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Kinerja Keuangan Daerah

Penggambaran implementasi atas pelaksanaan peraturan supaya terwujud dari misi maupun visi, tujuan, dan sasaran dari pemerintah daerah merupakan arti kinerja keuangan. Menurut Mahsun Suatu kinerja keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah melalui lapoan keuangan. Suatu analisis terkait kinerja keuangan daerah menurut Halim, dapat dilakukan dengan membandingkan hasil laporan keuangan tahun sebelumnya dengan hasil dari tahun yang dihitung. Dan kemudian Kesehatan keuangan sebuah bisnis secara keseluruhan disebut kinerja keuangan. Semua bisnis menggunakan aset keuangan dalam berbagai bentuk untuk mendukung aktivitas bisnis, yang menghasilkan pendapatan dan akhirnya keuntungan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. (Arsan et al. 2019). Pada dasarnya, tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan keuntungan bagi masyarakat. Banyak metrik kinerja keuangan yang berguna, tetapi beberapa yang paling penting adalah modal kerja, margin laba kotor dan bersih, rasio lancar, rasio cepat, rasio perputaran inventaris, leverage, laba per saham, rasio harga terhadap laba, dan arus kas bebas. (Semuel, Freddy 2019). Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab mempublikasikan laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan dan mengoptimalkan pengawasan. Hal ini penting bagi masyarakat, pemerintah pusat, badan legislatif, auditor dan lembaga keuangan. (Mahmudi 2010)

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan dari APBD Menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang adil dan efisien. Prioritaskan belanja daerah. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran, dan menciptakan transparansi antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan, dan masyarakat. (Rahman, Abdul 2023) Bagi Kementerian Keuangan RI, pemaparan APBD ialah suatu penetapan pemerintah daerah dengan periode 1 tahun terkait rencana keuangan untuk sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Struktur APBD ialah meliputi; Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Struktur APBD yang masuk pendapatan daerah ialah meliputi Pendapatan transfer, PAD, pendapatan lain yang sah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah; 2. Belanja Daerah; dan 3. Pembiayaan Daerah. Pada anggaran belanja daerah terbagi menjadi empat yakni: Belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer, serta belanja modal. Pada pembiayaan daerah, meliputi pemasukan atas pembiayaan, dan pendapatan transfer. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017)

1. Analisis Varians Pendapatan

Bagian dari teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menghitung hasil dana realisasi pendapatan serta jumlah anggaran. Jika hasil tercapai maka menandakan kinerja dari pemerintah daerah tergolong baik dan hasil kurang baik bila dana realisasi kurang dari anggaran yang ditetapkan (Kawatu 2019).

$$\text{Persentase Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan adalah suatu analisis yang dilakukan dengan melakukan pengurangan atas pendapatan tahun yang dihitung dengan pendapatan tahun sebelumnya dan hasilnya dikalikan seratus persen (Kawatu 2019).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t =$$

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } t-1} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan suatu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai suatu kinerja keuangan atau untuk mengukur suatu tingkat ketergantungan atau kemampuan dari pemerintah daerah atas bantuan pemerintah pusat dengan kategori instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif (Halim, Abdul, & Muhammad 2007)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan ialah alat perhitungan guna mengetahui proporsi pendanaan atas pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digolongkan rendah sekali, rendah, sedang, dan tinggi dalam pendanaan untuk otonomi daerah (Halim 2008)

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. METODE PENELITIAN

Pada Januari 2024 penelitian ini dilakukan dengan sasaran ialah daerah keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode dari 2021-2022 dengan populasi pada penelitian ini merupakan keseluruhan dari daerah di Provinsi Jawa Timur yakni 29 kabupaten dan 9 kota. Sampel yang digunakan yakni keseluruhan dari populasi penelitian yaitu 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan analisis data untuk analisis pendapatan dan analisis belanja dengan berfokus menggunakan; Analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Hasil Analisis Varians Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

Tahun	Selisih (M)	Persentase (%)	Kriteria
2021	9.057	107,42%	<i>Favourable Variance</i>
2022	7.729,17	106,41%	<i>Favourable Variance</i>
Rata-rata		106,91%	<i>Favourable Variance</i>

Sumber: Portal data Kemenkeu diolah, 2024

Hasil pengukuran analisis varians pendapatan memaparkan periode 2021-2022 digolongkan *favourable variance* serta nilai presentase 106,91%. Pada. Persentase pada Tahun 2021 daerah di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan ialah 107,42% serta angka selisih 9.057 Miliar dan masuk *favourable variance*. Pengukuran periode 2022, disimpulkan persentase menyentuh angka 106,41% serta nilai selisih 7.729,17 Miliar dan masuk kriteria *favourable variance*. Provinsi Jawa Timur memiliki hasil kinerja baik disebabkan adanya

peningkatan dalam realisasi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta adanya perkembangan kerjasama bersama *marketplace* perbankan.

Tabel 2.
Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2021	(5,10%)	Turun
2022	(1,32%)	Turun
Rata-rata	(3,21%)	Turun

Sumber: *Portal data Kemenkeu diolah, 2024*

Perhitungan analisis pertumbuhan pendapatan memaparkan periode 2021-2022 mengalami kriteria pertumbuhan turun serta persentase tingkat pertumbuhan -3,21%. Pada tahun 2021, menjelaskan di Provinsi Jawa Timur mencapai -5,10% dengan kriteria pertumbuhan turun dengan tingkat pertumbuhan nilai persentase negatif. Pengukuran pada Tahun 2022, persentase tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Timur -1,32% serta masuk kriteria pertumbuhan turun. Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan pendapatan turun atau hasil negatif dikarenakan penurunan pendapatan transfer khususnya bantuan operasional sekolah guna sekolah swasta sudah tidak dianggarkan. Serta adanya kondisi pandemi covid 19 yang mengakibatkan adanya penurunan pertumbuhan perekonomian di daerah Jawa Timur.

Tabel 3.
Hasil Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

Tahun	Persentase (%)	Pola Hubungan
2021	48,79%	Konsultatif
2022	53,69%	Partisipatif
Rata-rata	51,24%	Partisipatif

Sumber: *Portal data Kemenkeu diolah, 2024*

Pengukuran menurut rasio kemandirian, disimpulkan persentase Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022 menyentuh angka 51,24% atau dikatakan partisipatif. Pada Tahun 2021, persentase mencapai 48,79% serta tergolong konsultatif. Pengukuran di Tahun 2022, persentase Provinsi Jawa Timur 53,69% serta masuk partisipatif. Provinsi Jawa Timur digolongkan dalam kategori sedang dikarenakan dana PAD aspek pendapatan transfer Tahun 2022 meningkat mencakup; Pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel, dll.

Tabel 4.
Hasil Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

Tahun	Persentase (%)	Kategori
2021	62,21%	Sedang
2022	60,81%	Sedang
Rata-rata	61,51%	Sedang

Sumber: *Portal data Kemenkeu diolah, 2024*

Hasil rasio ketergantungan memaparkan bahwa dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022 tergolong sedang serta persentasenya 61,51% dan masuk dalam kategori sedang. Wilayah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 memiliki kategori sedang dengan persentase sebesar 62,21%. Hasil Tahun 2022, pada Provinsi Jawa Timur serta persentasenya 60,81% dan termasuk sedang. Provinsi Jawa Timur termasuk sedang disebabkan oleh penurunan pada belanja modal barang BLU. Hal tersebut, dapat terjadi karena naiknya harga pada solar selaras dengan harga minyak mentah dunia, dan juga diperparah dari adanya dampak konflik Rusia dan Ukraina.

4. KESIMPULAN

Kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2022 dilihat dari pengukuran berdasarkan menurut analisis varians pendapatan dikatakan memiliki kinerja baik yang tergolong *favourable variance* dengan presentase sebesar 106,91%. Pengukuran berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang jumlah persentase tingkat pertumbuhan -3,21%. Perhitungan menurut rasio kemandirian, Provinsi Jawa Timur masuk partisipatif bermakna kemandirian mendekati mampu pada pelaksanaan otonomi daerah dengan persentase 51,24%. Rasio ketergantungan, persentase sebesar 61,51% dan dikatakan sedang atau dikatakan masih dominan terhadap bantuan peranan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur seharusnya mampu berupaya lebih baik dalam mengoptimalkan penggunaan dana APBD agar dapat menjadi dasar pertimbangan sekaligus memberikan suatu masukan pemikiran yang bersifat positif terkait penilaian kinerja keuangan APBD. Dengan begitu, penyelewengan anggaran ke arah negatif akan dapat diminimalisir dan tujuan dari RPJPN di Negara Indonesia. Hendaknya peneliti lain dalam melakukan analisa terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah digunakan untuk sumber rujukan atau bahan referensi dalam pembuatan karya ilmiah dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan, dan diharapkan dapat dipraktikkan sesuai kaidah teori yang dipelajari dengan menambah teknik analisis penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andila, Adel Putri. n.d. "Provinsi Dengan Tindak Pidana Korupsi Terbesar Di Indonesia." <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-tindak-pidana-korupsi-terbesar-di-indonesia-y8usf>,.
- Arsan, Latif, Rikie, Andriyana, Yanuar Kuswanto, Rosada, Maulana Hilman, Ajie Cakra, and Hasbi. 2019. "Pengelolaan Keuangan Daerah," 3. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/6075>.
- BI Bank Sentral RI. 2022. "Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur 2022." 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur--Agustus-2022.aspx>.
- Deborah, Pandensolang Juvitta, and Marjam Mangantar. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8 (1).
- Halim, Abdul, & Muhammad, Syam Kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam, Tri Laksono Mugroho. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi Dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. “Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” 2017. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017>.
- Krisniawati, Krisniawati. 2021. “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR.” *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 5 (1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>.
- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Maryanti, C Susi, and Agus Munandar. 2021. “Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.” *Jurnal Ilmiah MEA* 5 (3).
- Ningtias, Yeni Dwi, Tatas Ridho Nugroho, and Nur Ainiyah. 2016. “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016.” *Jurnal Akuntansi*, 2.
- Rahman, Abdul, Nasir. 2023. *Monograf Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Membangun Kemandirian Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah*. Riau: Dotplus Publisher.
- Rahmasari, Avinda Goldea. 2021. “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto).” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 9 (3). <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86>.
- Ramadhan, Muhammad Aldi, and Hendratno. 2023. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5 (10).
- Selocahyo, Basoeki, Utomo S. 2022. “Proyeksi 2022 BI Perkiraan Ekonomi Pada 2022 Tumbuh 4,7-5,5 Persen.” 2022. <https://koran-jakarta.com/bi-perkiraan-ekonomi-pada-2022-tumbuh-4-7-5-5-persen?page=all>.
- Samuel, Freddy, Kawatu. 2019. *Analisis Laporan Keuangan SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Tanpa Penulis. n.d. “Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.” <https://indonesia2045.go.id/>.
- Yuliani, Nur Laila. 2014. “Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 5 (2).